

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kebijakan Politik**

Kebijakan dan politik memiliki definisinya masing-masing. Secara sederhana Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa pada hakikatnya kebijakan terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan atau petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemberlakuannya(Sol ichin Abdul Wahab, 2012:21).

Menurut Heclo (1977): kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan Menurut Friedrik (1963): kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang, group, dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan.( Imron, Ali. 2002: 11).

Jadi kebijakan adalah suatu tindakan yang yang dilakukan sebuah dalam sebuah lembaga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Sedangkan pengertian politik menurut beberapa ahli, seperti RamlanSurbakti adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.”(Ramlan Surbakti, 1991:1).

Sedangkan menurut F. Isjwara politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan.” Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Berdasarkan definisi kebijakan dan definisi politik yang telah disebutkan beberapa ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah hal-hal yang dirumuskan oleh pemerintah yang menyangkut kebutuhan dan kebaikan masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan politik adalah alat untuk mendapatkan kekuasaan agar mampu untuk merumuskan dan menegakkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan politik adalah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannya untuk memberikan yang terbaik bagi kebutuhan masyarakat dan negaranya.

Kebijakan politik biasanya berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam hubungan luar negeri yang pada akhirnya diperuntukan bagi kemaslahatan rakyat dan negara.

Pada penelitian ini, peneliti hendak meneliti secara lebih mendalam tentang kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia selama pasca kemerdekaan. Kebijakan politik tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri selaku pimpinan pemerintahan Indonesia yang saat itu menjalankan sistem pemerintahan parlementer. Adapun yang menjadi Perdana Menteri pada saat itu adalah Sutan Sjahrir. Peneliti akan menguraikan bagaimana sepak terjang Sutan Sjahrir selaku Perdana Menteri, apa dan apasajakah kebijakan politik yang dia keluarkan selama menjabat sebagai pimpinan pemerintahan. Kebijakan politik yang dimiliki Sutan Sjahrir berkaitan dengan pemikiran politik yang dimikilinya.

## **B. Konsep Kebijakan Politik Sutan Sjahrir**

Perjalanan kehidupan politik Sutan Sjahrir banyak mendapat pertentangan dari tokoh-tokoh nasional yang berpendapat bahwa penyelesaian konflik melalui diplomasi bukan merupakan jalan yang terbaik tapi dengan peranglah baru bisa terlaksana.

Sjahrir adalah arsitek terjadinya pergeseran sistem di bulan November 1945, yaitu dari sistem presidensial sebagaimana ditetapkan dalam UUD yang pertama menjadi sistem parlementer. Suatu pergeseran yang dicapai bukan melalui

perubahan UUD melainkan dengan diterimanya konvensi yang menyatakan UUD akan berjalan di dalam sistem parlementer.

Rosihan Anwar (2011:xii) berpendapat bahwa pemikiran politik yang dimiliki Sutan Sjahrir adalah hal-hal yang tidak umum dimiliki oleh tokoh-tokoh politik di masanya. Pemikiran politik tersebut pada akhirnya mempengaruhi berbagai kebijakan politiknya sebagai Perdana Menteri. Hal tersebut berdasarkan pendapat Rosihan Anwar (2011:xii) sebagai berikut:

Membaca tulisan-tulisan Sutan Sjahrir, muncul kesan yang sangat kuat dalam diri saya bahwa bagi dia politik bukanlah perkara yang tak terelakan dalam hidupnya. Demikian pula politik untuk dia tidak terutama berarti merebut kekuasaan. Politik juga bukan persoalan mempertaruhkan modal untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh pelaksana *money politic* dewasa ini di tanah air kita. Bahkan politik juga tidak sekedar mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar.

Bagi Sjahrir, politik bukan semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas instrumental. Bagi Sjahrir, politik lebih dari pragmatism simplistic, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan pula rasionalitas nilai-nilai. Bagi Sjahrir, politik adalah mempertaruhkan hidup dan dengan itu memenangkan hidup itu sendiri.

Sifat strategi Sjahrir sebagian terungkap dalam responnya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Agustus 1945, dan sebagian dalam manuver-manuver politik berikutnya yang menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai perdana menteri, juga dalam cara ketika pemerintahannya mendapatkan tekanan-tekanan dari dalam dan luar negeri. Sejumlah asas pedoman dapat kita lihat dalam tindakan-tindakannya selama periode itu, di antaranya ada yang merupakan

perpanjangan atau evolusi pandangan itu dalam rangka situasi yang berkembang.

Ketika menjalankan perannya sebagai Perdana Menteri, Sjahrir telah mengeluarkan berbagai kebijakan politik yang kontroversial bagi rakyat terutama bagi kalangan aktivis revolusioner seperti Tan Malaka. Salah satu kebijakan politiknya yang kontroversial tersebut adalah ketika Sjahrir memberikan bantuan beras kepada pemerintah India saat konferensi Asia di New Delhi. Kebijakan politik tersebut diberi nama diplomasi beras.

### **C. Konsep Upaya Mempertahankan atas Kemerdekaan Republik Indonesia**

Mempertahankan kemerdekaan adalah suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan ketika sebuah negara yang telah merdeka akan di rebut kembali oleh bangsa lain. Mempertahankan kemerdekaan juga dapat berarti menjaga keutuhan dan kekompakan dalam satu persatuan bangsa dalam menghadapi sebuah tantangan dari dalam dan luar.

“Syarat mutlak untuk mengekal-abadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah persatuan dari bangsa (...) Kita pertahankan negara Proklamasi yang digempur kembali atau hendak digempur kembali oleh Imperialisme dengan sukses, dengan pancasila, dengan gabungan Mutlak dari segenap tenaga revolusioner. (...) Mempertahankan dengan Persatuan, memperjuangkan dengan pancasila.”  
(Soekarno dalam Raharjo dan Gusmian, 2002: 120-121)

Menurut WJS Poerwadarminto (mempertahankan kemerdekaan adalah “Mengusahakan supaya tetap/membiarkan pada keadaan semula”. Sedangkan

kemerdekaan adalah: Suatu kebebasan dari penjajahan/suatu kebebasan untuk berdiri sendiri”.

Pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah upaya untuk membela, menjaga, melindungi bangsa Indonesia dari usaha penjajahan yang membahayakan kebebasan kedaulatan bangsa Indonesia.

Mempertahankan kemerdekaan juga dalam rangka memperjuangkan pengakuan sebagai negara merdeka yang berdaulat dari masyarakat dunia. Mendapat pengakuan dari pihak luar terkait kemerdekaan dan kedaulatan merupakan faktor yang dapat memudahkan suatu negara berinteraksi dengan negara lain, sehingga dapat berkomunikasi dan bergaul dengan dunia luar. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan negara dalam memenuhi kebutuhan bangsanya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan dan mendapatkan pengakuan kemerdekaan, yaitu melalui perjuangan diplomasi, perjuangan bersenjata dan perjuangan masa aksi, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Perjuangan Diplomasi

Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berusaha mendapatkan pengakuan dari dunia internasional salah satunya dilakukan dengan cara diplomasi. Perjuangan dengan cara diplomasi didasarkan atas pandangan pesimistis dan perimbangan kekuatan dunia dan atau kekuatan-kekuatan revolusi Indonesia (M. Zeini Hasan, 1980:157). Langkah diplomasi merupakan cara yang dipilih orang Sjahrir untuk mempertahankan dan mendapatkan pengakuan dari

dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena bagi Sjahrir kedudukan Indonesia yang lemah pada saat itu yang menurutnya berada di bawah pengaruh kekuatan kapitalis Amerika Serikat dan Inggris., sedangkan nasib Indonesia bergantung pada kebijakan politik yang akan diambil oleh kedua negara tersebut. Berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi Indonesia, Sjahrir mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin kemerdekaan Indonesia adalah dengan diplomasi. (Alfian,1983,175)

## 2. Perjuangan Bersenjata

Perjuangan bersenjata terjadi saat pemuda hendak melucuti tentara Jepang dan mendapat perlawanan seperti di kota Semarang yang terjadi pertempuran selama lima hari pada tanggal 15 Oktober 1945. Perjuangan bersenjata ini terus berlanjut ketika Belanda diketahui membongkang tentara Sekutu dan ingin kembali menguasai Indonesia.

## 3. Perjuangan Aksi Massa

Bentuk-bentuk dari perjuangan masa aksi ini dilakukan dengan demonstrasi, pemogokan atau pemboikotan, penyitaan aset-aset ekonomi musuh dan dapat menjelma menjadi perlawanan bersenjata. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperoleh hak-hak politik dan ekonomi dari penguasa (penjajah).

## **F. Kerangka Pikir dan Paradigma**

### **1. Kerangka Pikir**

Ada hal penting yang harus diperjuangkan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Pasca kemerdekaan hal yang harus di dapati Indonesia adalah pengakuan dari dunia luar tentang keberadaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Hal tersebut disadari oleh berbagai pihak yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik golongan tua maupun golongan muda. Sutan Sjahrir adalah satu dari sekian banyak pejuang Indonesia yang memikirkan tentang keberlangsungan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang harus diakui dunia.

Berbeda dengan kebanyakan tokoh pergerakan Indonesia yang juga mencetuskan Revolusi Nasional, Sjahrir adalah tokoh yang memilih berjuang dengan cara damai. Disaat yang lain memikirkan cara berevolusi dengan senjata dan keras terhadap Belanda dan sekutunya atau melakukan cara-cara konfrontasi dalam mempertahankan kemerdekaan, Sjahrir justru memilih jalan diplomasi, mendekati kepada berbagai pihak.

Perjuangan diplomasi ini didasarkan atas pandangan pesimistis dan pertimbangan kekuatan dunia dan kekuatan-kekuatan revolusi Indonesia. Berdiplomasi merupakan cara aman yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang baru memperoleh kemerdekaan.



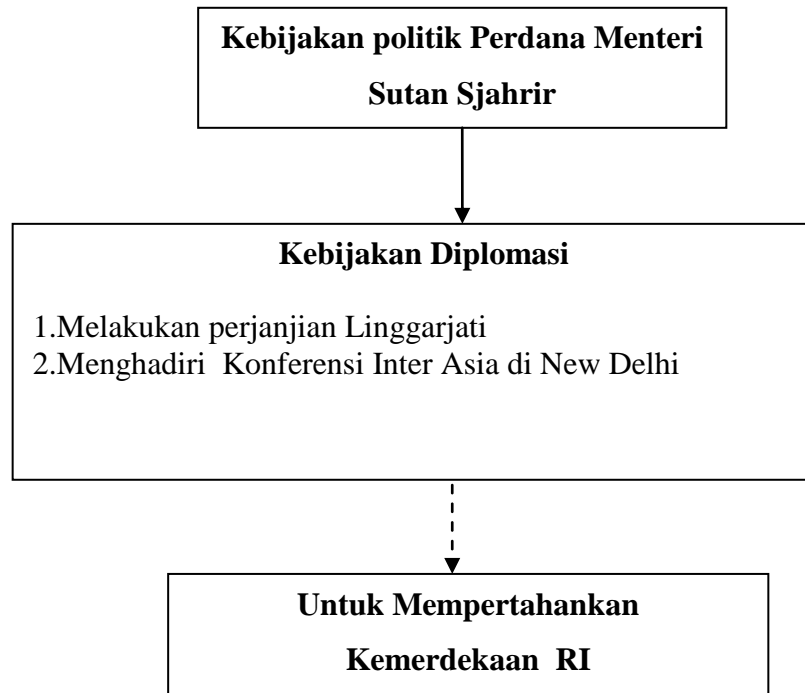
Di samping itu, saat itu Indonesia masih berada di bawah pengaruh kapitalis Amerika Serikat dan Inggris. Diplomasi dipandang sebagai cara yang cerdas dan tepat untuk memperoleh pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Perjuangan diplomasi ini untuk mendapatkan pengakuan secara *de facto*, agar kelak Indonesia bisa berinteraksi, bergaul dan bersosialisasi dengan dunia internasional.

Sjahrir memiliki pemikiran politik yang melebihi zamannya. Baginya politik adalah usaha dan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai martabat dan kesejahteraan manusia. dan untuk memperjuangkan nilai-nilai tersebut tidak mungkin diwujudkan dengan cara menghilangkan feodalisme dan menolak setiap politik yang totaliter. Berdasarkan pemikiran politik yang dia miliki, Sjahrir dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri pada masa awal kemerdekaan Indonesia, melakukan berbagai macam diplomasi kepada negara-negara luar hingga pada masa jabatannya tersebut yaitu membentuk GBHN melalui forum KNIP dan menjadikannya Manifesto Politik pada tahun 1945, pada tahun 1946 adanya konferensi Linggar Jati hal ini menjadi Perjuangan Diplomasi ini didasarkan atas pandangan Perdana Menteri Sjahrir mengenai kedudukan Indonesia sebagai negara muda yang masih sangat lemah pada waktu itu. Menurut Sjahrir kedudukan Indonesia berada di daerah pengaruh kekuasaan kapitalis Amerika Serikat dan Inggris dan ia memandang bahwa nasib Indonesia amat tergantung pada kebijakan politik yang akan diambil oleh kekuasaan kapitalis itu maka tidak bijaksana jika Indonesia melakukan konfrontasi dengan kedua kekuatan tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1947 ia mendukung pembentukan *Inter Asian Relations conference* di New Delhi hal ini bertujuan untuk menggalang kerjasama antara negara-negara Asia dalam mencapai tujuan bersama, khususnya kemerdekaan , keamanan, dan kesejahteraan manusia. dan kemudian menjadi embrio kelahiran politik bebas aktif hal ini disampaikan pada sebuah pidato Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk tidak memihak salah satu blok.

Politik bebas aktif yaitu politik yang turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kejadian-kejadian di dunia tanpa membangun afiliasi dengan salah satu dari blok-blok yang sedang bersaing. Hal ini merupakan bagian dari revolusi Indonesia. Terhadap hal tersebut, Sjarir berpendapat bahwa revolusi nasional harus segera disusul dengan revolusi sosial yang dapat membebaskan rakyat dari feodalisme dan jebakan-jebakan ke arah fasisme yang muncul bersamaan dengan kapitalisme yang tak terkendali.

## 2. Paradigma



### Keterangan :

- > **Garis Aktivitas**
- - - - -> **Garis Sumbangan**

## REFERENSI

- Alfian.1983. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. PT gamedia Pustaka Utama. Jakarta. Halaman 175.
- Anwar, Rosihan. 2011. *Sutan Sjahrir, Negarawan Humanis, Demokrat Sejati Yang Mendahului zamannya*. Buku Kompas. Jakarta. Halaman xii.
- Hasan, Zein. 1980. *Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri*.halaman 157.
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta. Bandung. Halaman 35.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Mandar Maju. Bandung. Hal 64.
- Pamoe Raharjo&Islah Gusmian. 2002. *Bung Karno Dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*. Galang Press: Yogyakarta. Halaman 129&134
- Surbakti, Ramlan. 1991. *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia. Jakarta. Halaman 1.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta. Halaman 21.